

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, bahwa kami dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa Kabupaten Merangin Tahun 2014. Rencana Kerja (RENJA) Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin tahun 2014 sebagai penjabaran Rencana Strategis BPMPD Tahun 2008-2013 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya, sehingga penyusunan Renja dimaksud dapat terwujud dengan harapan dalam pelaksanaannya senantiasa diberikan kelancaran dan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan BPMPD untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.

Pada akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2014 Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin ini dapat bermanfaat bagi segenap pihak untuk terselenggaranya perbaikan kinerja manajemen (performance planning) pemerintahan.

Bangko , 2014

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MERANGIN,

Drs. H. MARZUKI YAHYA
Pembina Utama Muda
NIP. 19570510 198203 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.3.1 Maksud.....	7
1.3.2 Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	26
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) SKPD.....	27
3.2.1. Tujuan.....	27
3.2.2 Sasaran.....	28
3.3 Program dan Kegiatan.....	28
3.3.1 Program Kerja Tahun 2014.....	28
3.3.2 Kegiatan Prioritas Tahun 2014.....	30
BAB IV PENUTUP.....	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin tahun 2014 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan , Renja sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa Kabupaten Merangin menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Merangin ke dalam program dan kegiatan Badan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Badan secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Kabupaten Merangin.

Peroses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi diformulasikan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan yang memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini

sejalan dengan pasal 2 (dua) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang Rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Merangin.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renstra SKPD yang dilanjutkan dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka panjang menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafond Anggaran Sementara dan APBD.

Sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2014 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin menetapkan 12 (dua belas) Program dan 61 (Enam puluh satu) Kegiatan yang di dalamnya memuat seluruh rencana atau target kinerja yang ingin dicapai yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis (Strategic Performance Indicators) yang relevan, yang pada dasarnya merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisir secara sistematis dan mengukur hasilnya untuk umpan balik perbaikan.

Rencana Kerja merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari kegiatan pokok diantaranya

penyusunan perencanaan strategik, program dan kegiatan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan (Rencana Kerja Tahunan) dan diakhiri adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penetapan tersebut memberi daya dorong (drive) sekaligus sebagai komitmen merencanakan dan mengendalikan sumber daya yang diserahkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin.

Proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) didasarkan pada aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musrenbang tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

1.2 Landasan Hukum

Sejalan dengan Reformasi disegala bidang yang telah membuahkan dasar – dasar perubahan dibidang manajemen pemerintahan, hal tersebut antara lain dilandasi oleh :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2015;

18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 Tahun 2010; Nomor: 0199/M PPN/04/2010; Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 229);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor penting dalam pencapaian kinerja dalam 1 (satu) tahun. Didalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin menetapkan maksud dan tujuan sebagai berikut :

I.3.I Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin adalah untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan antar lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi maupun Kabupaten/ Kota serta bidang-bidang pada BPMPD Kabupaten Merangin sehingga dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya yang tersedia.

Renja BPMPD sebagai wujud dukungan kinerja untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang ditetapkan Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin agar dalam pelaksanaannya dapat lebih

terarah dan terukur. Rencana Kerja (RENJA) ini juga merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode satu (1) tahun yang diambil dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang dimiliki oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin.

I.3.2 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Merangin secara keseluruhan.

Dimana dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan proses jangka pendek yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu (1) tahun yang didalamnya memuat seluruh rencana atau target kinerja yang ingin dicapai yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis (Strategic Performance Indicators).

Tujuan penyusunan Rencana Kerja BPMPD Kabupaten

Merangin Tahun 2014 adalah :

1. Terwujudnya penjabaran prioritas Rencana Strategis BPMPD 2014-2018
2. Terwujudnya Sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar lembaga pemerintah maupun antar bidang pada BPMPD Kabupaten Merangin.
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil program kegiatan.
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisiensi, sefektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahah Desa (BPMD) Kabupaten Merangin sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

- 2.1 Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAN IV. PENUTUP

Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang perubahan Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan dengan mengukur realisasi capaian-capaian target perencanaan yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis. Oleh karena itu Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin ini juga dievaluasi berdasarkan realisasi capaian-capaian target program/kegiatan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dan perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan sampai dengan tahun 2014. Evaluasi terhadap Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin tahun 2014 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan rencana program/kegiatan dan hasil rencana program/kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin tahun 2014 juga dipengaruhi oleh dilaksanakannya Peraturan Bupati Karimun Nomor 20 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unit Kerja Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin. Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa (BPMPD) mengalami perubahan struktur organisasi, tugas dan fungsi dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Merangin. Lebih rinci,

perubahan struktur organisasi, tugas dan fungsi tersebut akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya di Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

Adapun dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja ini memperhatikan beberapa unsur pokok lain, yaitu :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya;
- e. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2014;
- f. Memperhatikan keberlanjutan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) dan capaian Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat dari berbagai indikator yang di rekap melalui table berikut;

2.2 Analisi Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah kabupaten Merangin dan Peraturan Bupati Merangin Nomor 23 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unit Kerja pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin maka Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
3. Pelaksanaan dan pembinaan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
4. Pembinaan unit pelaksana teknis Badan.
5. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Badan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa membawahi:

- a. Sekretaris Badan.
- b. Bidang Pemberdayaan Desa / Kelurahan.
- c. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat.
- d. Bidang Pemerintahan Desa.
- e. Bidang Ketahanan Masyarakat Desa
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris mempunyai tugas melakukan Koordinasi Bidang – bidang di lingkungan jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengenai rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan protokoler.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai Fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kearsipan dan protokoler.
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- c. Pelaksanaan urusan keuangan.
- d. Pelaksanaan urusan pembuatan program, evaluasi dan pelaporan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

BIDANG PENGEMBANGAN DESA / KELURAHAN

Bidang Pengembangan Desa/ Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di Bidang Pengembangan Desa/ Kelurahan, meningkatkan peranan pengembangan kawasan terpadu serta pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), Perlombaan Desa/ Kelurahan, Pendataan dan evaluasi Desa/ Kelurahan.

Untuk menyelenggarakan Bidang Pengembangan Desa/ Kelurahan mempunyai Fungsi :

- a. Mengumpul dan mengelola Data Profil desa/ Kelurahan.
- b. Penyusunan Rencana dan Program pengembangan manajemen pemberdayaan masyarakat serta mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa/ Kelurahan.
- c. Penataan dan pengembangan kawasan terpadu perdesaan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA.

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan sector informal serta bantuan pembangunan/ pengkriditan, tenaga kerja, prasarana dan sarana Desa/ Kelurahan dan perumahan lingkungan pemukiman Desa/ Kelurahan serta pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan pembinaan pelaksanaan bantuan pembangunan Desa/ Kelurahan yang bersumber dari Pusat maupun Daerah.
- b. Perumusan kebijakan fasilitas pengkriditan dan perumusan kebijakan pembinaan tenaga kerja dan sektor informal.
- c. Perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan dan pembinaan pendataan pemukiman dan perumahan.

- d. Perumusan kebijakan fasilitas prasarana dan sarana Desa/ Kelurahan dan perumusan kebijakan pelaksanaan pelestarian Sumber Daya Desa/ Kelurahan.
- e. Menyusun petunjuk bimbingan teknis mengenai Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui kelembagaan masyarakat yang ada di Desa/ Kelurahan.
- f. Pelaksanaan pengembangan, pemantauan dan evaluasi program pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- g. Pemberian bimbingan teknis dalam rangka program kerja sarana pendayagunaan dan pengkajian Teknologi Tepat Guna.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

BIDANG PEMERINTAH DESA

Bidang Pemerintah Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dalam penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Tata Pemerintah Desa/ Kelurahan, pengembangan Desa/ Kelurahan, pendapatan dan kekayaan Desa serta Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Lembaga Desa

Untuk menyelenggarakan Bidang Pemerintah Desa/mempunyai Fungsi:

- a. Mengumpul bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan tata penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan.
- b. Menghimpun bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan dan pendapatan kekayaan Desa/ Kelurahan.
- c. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perangkat dan administrasi Pemerintah Desa/ Kelurahan.
- d. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan Desa/ kelurahan dan pembinaan Lembaga Desa/ Kelurahan.
- e. Pelaksanaan pembinaan Lembaga Adat.
- f. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

BIDANG KETAHANAN MASYARAKAT DESA

Bidang Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, bimbingan dan keterampilan dan wawasan Masyarakat Desa/ Kelurahan guna memfasilitasi 10 Program Pokok PKK dan Program Terpadu P2WKSS dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai Fungsi :

- a. Melaksanakan Peningkatan Sumber Daya Manusia terhadap Masyarakat Desa/ Kelurahan.
- b. Melaksanakan Pembinaan 10 Program Pokok PKK.
- c. Melaksanakan Program Terpadu P2WKSS.
- d. Melaksanakan Pembinaan dan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- e. Melaksanakan Pembinaan dan Fasilitas Makanan Tambahan Desa.
- f. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa didukung oleh anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Merangin sebagai wujud kepedulian secara menyeluruh dari pemerintahan tertinggi dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Program-program tersebut telah berdampak nyata terhadap perkembangan dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sendiri pembangunan di desa. Melalui program-program tersebut akan terwujud masyarakat yang mandiri dan kreatif yang memicu tingkat perkembangan

ekonomi masyarakat. Sedangkan untuk urusan bidang Kesatuan Bangsa sepenuhnya masih didukung oleh anggaran yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin

Beberapa hal yang menjadi kinerja SKPD dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan Desa antara lain :

- a. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan ekonomi masyarakat serta melaksanakan bimbingan teknologi tepat guna dalam proses pemanfaatan potensi sumber daya alam di desa.
- b. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan peranan kelembagaan dan pelatihan masyarakat.
- c. Mengolah data, pengolahan keuangan desa, menyusun, merencanakan dan melaksanakan pengembangan pemerintahan desa.
- d. Mengumpulkan, mengolah data, merencanakan, melaksanakan dan memberi petunjuk serta bimbingan terhadap peningkatan fungsi dan peran kelembagaan masyarakat dan lembaga lainnya
- e. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan, pembinaan nilai-nilai sejarah kebangsaan dan pelaksanaan pembauran
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi
- g. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi hubungan dengan organisasi masyarakat

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten merangin ada beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi yaitu :

- a. Masih relatif terbatasnya kemampuan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
- b. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, karena belum efektifnya pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat (seperti LKMD dan PKK) dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.
- c. Masih besarnya jumlah penduduk miskin, karena kurang berkembangnya usaha ekonomi produktif keluarga miskin, yang disebabkan oleh terbatasnya akses keluarga miskin dalam memanfaatkan sumberdaya pembangunan untuk mengembangkan usaha perekonomiannya.
- d. Belum mantapnya kehidupan sosial budaya masyarakat, yang disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan kebijaksanaan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- e. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan, karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal.
- f. Peningkatan komitmen Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat dan pematapan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD (sebagai rencana pembangunan tahunan daerah).

- g. Keterkaitan fungsional antara program pemberdayaan masyarakat dan pematapan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan skala nasional dengan program spesifik daerah.
- h. Dukungan anggaran dalam membiayai program-program APBD Kabupaten/Kota.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. RKPD merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). RKPD tersusun melalui beberapa mekanisme perencanaan yaitu melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa / Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota termasuk Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD). Dalam hal penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin Tahun 2014 mengacu pada RKPD Kabupaten Merangin prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan perekonomian daerah guna menekan angka kemiskinan;
2. Peningkatan daya tarik daerah guna meningkatkan nilai investasi guna memperluas lapangan pekerjaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan;
3. Peningkatan sumberdaya manusia melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, iman dan taqwa
4. Peningkatan kehidupan masyarakat pedesaan dan pesisir melalui revitalisasi pertanian dan perikanan;
5. Peningkatan pembangunan Aparatur Pemerintah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan usulan dari kegiatan Musrenbang yang terkait dengan usulan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin ke dalam rancangan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin.

Dari hasil Forum SKPD dilakukan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana kerja RKPD bagi setiap SKPD. Dalam keadaan terdapat usulan masyarakat yang mendesak dan belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang.

Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap SKPD yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD. Sehingga rancangan RKPD merupakan integrasi dan harmonisasi antara rancangan awal RKPD dengan rancangan RENJA SKPD yang telah mendapatkan konfirmasi dan review dari setiap SKPD.

Musrenbang tahunan atau Musrenbang RKPD dan Forum SKPD berfungsi menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat, serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan

Kebijakan dalam melaksanakan tugas, kegiatan dan program di bidang pembangunan di Kabupaten Merangin selama ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin berpedoman dan mengacu kepada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas/Badan Daerah Kabupaten Merangin.

Berikut adalah arah kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin :

1. Memfasilitasi dan melakukan pembinaan Penyelenggaraan Adm. Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik;
2. Meningkatkan pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam menggerakkan Partisipasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dalam Pembangunan;
3. Memantapkan kehidupan Sosial Budaya Masyarakat sesuai tradisi dan Adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan dan ketertiban masyarakat;

4. Mendorong kemandirian masyarakat perdesaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai wujud Penanggulangan kemiskinan;
5. Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan keluarga, ketahanan pangan Masyarakat, memantapkan manajemen Lembaga Keuangan Mikro (LKM) perdesaan dan usaha-usaha desa serta Pengembangan institusi pasar /pasar desa;
6. Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi masyarakat dalam Pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang didukung sarana fasilitasi Kerja yang memadai.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Sehubungan dengan adanya perubahan susunan organisasi, tugas dan fungsi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin maka rumusan tujuan dan sasaran yang terdapat pada Renstra tahun 2008 - 2013. Perubahan tersebut mempengaruhi rumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin Tahun 2014.

Berikut merupakan rumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin :

3.2.1 Tujuan

1. Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan dan lembaga kemasyarakatan.

2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana desa.
3. Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mengembangkan penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi masyarakat.
5. Terciptanya kesatuan bangsa antar komponen masyarakat.
6. Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan partai politik dalam pembangunan daerah.

3.2.2 Sasaran

1. Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan.
2. Meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam proses pembangunan diwilayah perdesaan.
3. Mendorong upaya pengelolaan Usaha Ekonomi Masyarakat.
4. Meningkatnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi tepat guna.
5. Meningkatnya pemahaman persatuan dan kesatuan bangsa.
6. Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa menetapkan Program dan kegiatan sebagai berikut:

3.3.1 Program Kerja Tahun 2014

Program - program yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan (BPMPD) Kabupaten Merangin Tahun 2014 merupakan program yang terkait dengan

sasaran dalam dokumen Renstra dan usulan langsung dari masyarakat. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan program – program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun program-program yang telah ditetapkan untuk Rencana Kinerja tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Administrasi PNPM-MP Kabupaten Merangin Tahun 2014.
2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan.
4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
6. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

3.3.2 Kegiatan Prioritas tahun 2014

Berdasarkan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin tahun 2014, maka ditetapkan pula kegiatan-kegiatan berdasarkan skala prioritas sebagai berikut :

1. Pembinaan Administrasi PNPM-MP Kabupaten Merangin Tahun 2014.
2. Pendayagunaan Profil Desa dan Aplikasi Profil Desa.
3. Pelatihan Kader Posyandu.
4. Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan Unggulan.
5. Pemberdayaan Sistem Informasi Posyandu (SIP).
6. Peningkatan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S).
7. Pembinaan Hutan Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
8. Pembinaan Desa Mandiri Energi Berbasis Terbarukan Biogas
9. Fasilitas Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro kecil dan Menengah di Perdesaan

10. Pembinaan dan Pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Nasional.
11. Pemberdayaan Pelaku PISEW Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
12. Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Masyarakat (BBGRM).
13. Fasilitasi Penyelenggaraan Alokasi dana desa (ADD) dan Pembinaan Administrasi Desa.
14. Pembinaan dan monitoring pengelolaan Kekayaan Desa
15. Raker Kepala Desa dan Ketua BPD se-Kabupaten Merangin Tahun 2014.
16. Penatausahaan Aset Badan PMPD Kabupaten Merangin Tahun 2014.
17. Fasilitasi Pembinaan Administrasi Desa
18. Pelatihan Sekretaris Desa dalam penyusunan RPJMD Desa
19. Pencanaan P2W- KSS
20. Sistem Informasi Manajemen PKK
21. Jambore Temu Kader PKK tingkat Kabupaten.
22. Jambore Temu Kader PKK tingkat Provinsi.
23. Jambore Temu Kader PKK tingkat Nasional.
24. Lomba Masak Serba Ikan dan Lomba Masak Menu 3.BA Tk. Provinsi.
25. Pembinaan 10 Program Pokok PKK
26. Lomba Masak Serba Ikan dan Lomba Masak Menu 3.BA Tk. Kabupaten
27. Lomba Posyandu
28. Lomba Tertib Administrasi PKK
29. Lomba Pemamfaatan Pekarangan
30. Lomba Prilaku Hidup Bersih dan Sehat

Lebih rinci, rumusan program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin dijabarkan melalui target dan capaian tahun 2014 pada tabel berikut :

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin tahun 2014 yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintergrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja (RENJA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin tahun dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan APBD.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merrangin Tahun Anggaran 2014 ini dibuat kiranya dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin.

Bangko , 2014

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MERANGIN,

Drs. H. MARZUKI YAHYA
Pembina Utama Muda
NIP. 19570510 198203 1 010

**TABEL RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PMPD KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2014**

SKPD : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) KAB. MERANGIN

(dalam ribuan)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja		Total Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Rencana Tahun 2014					Catatan Penting	Tahun 2015		
				Satuan	Volume		Sumber Dana (X Rp. 000)						target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
							APBD			APBN					
							APBD II	APBD I	DAK	DEKON	TP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (8+9+10+11+12)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
1	Urusan Wajib					-	4.528.362,00	-	-	-	-				
1	20	Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan program													
1	20	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.				1.034.207,00								
1	20	01	01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan akan jasa surat menyurat kantor pemerintah daerah	BPMPD	Tahun	1		960,00					
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jaringan komunikasi telepon kantor, air bersih dan listrik di lingkungan kantor pemerintah daerah	BPMPD	Tahun	1		38.400,00					
1	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Terpelihara dan tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional	BPMPD	Tahun	1		9.210,00					
1	20	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya Keakuratan data Keuangan SKPD	BPMPD	Tahun	1		64.200,00					
1	20	01	08	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Meningkatkan Kebersihan dan kerapian lingkungan kantor	BPMPD	Tahun	1		11.830,00					
1	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor bagi aparatur pemerintah	BPMPD	Tahun	1		80.692,00					
1	20	01	11	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan akan barang cetakan dan penggandaan.	BPMPD	Tahun	1		59.665,00					
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Fasilitas bangunan kantor yang mendapat instalasi listrik/penerangan	BPMPD	Tahun	1		3.940,00					
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan umum dan peraturan perundang-undangan bagi aparatur	BPMPD	Tahun	1		48.000,00					
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman bagi aparatur	BPMPD	Tahun	1		121.910,00					
1	20	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Terkoordinasinya urusan-urusan pemerintahan daerah	BPMPD	Tahun	1		462.200,00					

1	20	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	BPMPD	Tahun	1				113.200,00						
1	20	01	20	Penyediaan Dana dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Tercapainya sasaran program dan kegiatan pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat	BPMPD	Tahun	1				20.000,00						
1	20	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								452.190,00						
1	20	2	3	Pembangunan Gedung Kantor	Meningkatnya Kebersihan Kantor	BPMPD	Tahun	1				68.685,00						
1	20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya sarana mobilitas bagi aparatur pemerintah daerah	BPMPD	Unit	11				192.475,00						
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	BPMPD	Buah	15				61.450,00						
1	20	2	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	BPMPD	Buah	3				39.150,00						
1	20	2	10	Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	BPMPD	Buah	5				7.900,00						
1	20	02	11	Pengadaan Komputer	Terpenuhinya sarana dan prasaranakerja	BPMPD	Unit	3				42.750,00						
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya ketahanan dan keindahan bangunan gedung kantor	BPMPD	Unit	1				6.390,00						
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Meningkatnya umur ekonomis kendaraan dinas/operasional	BPMPD	Unit	4				6.390,00						
1	20	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya ketahanan peralatan gedung kantor	BPMPD	Unit	10				27.000,00						
1	20	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								101.500,00						
1	20	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan 60 stel baju PDH beserta Perlengkapannya	BPMPD	Stel	60				29.500,00						
1	20	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya pengadaan 60 stel baju Olah raga dan Pakaian Seragam LAD 110 stel	BPMPD	Stel	60 dan 110				72.000,00						
1	20	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR								50.000,00						
1	20	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya SDM Aparatur dan pengurus PKK	BPMPD	Orang	60				50.000,00						
1	20	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN								54.197,00						
1	20	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Tersediannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BPMPD	EKS	12				5.838,00						
1	20	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Terlaksana Pembuatan Laporan Keuangan SKPD (Semester dan akhir tahun)	BPMPD	EKS	24				10.726,00						
1	20	06	05	Penyusunan RKA, DPA, dan DPA-P	Tersediannya RKA-DPA dan DPA-P	BPMPD	EKS	30				12.025,00						
1	20	06	06	Penatausahaan Aset BPMPD	Meningkatnya keakuratan data Aset BPMPD	BPMPD	Tahun	1				19.340,00						

1	20	06	07	Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	Tersedianya laporan tahunan SKPD	BMPMD	EKS	12		6.268,00							
1	22			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERNTAHAN DESA													
1	22	07		PROGRAM PENYEBARAN LUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN						42.367,00							
1	20	07	01	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	Meningkatnya informasi tentang pembangunan yang dapat diketahui oleh masyarakat	BPMDD	KALI	1		42.367,00							
1	22	09		PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI PNPM-MP KAB. MERANGIN						366.244,00							
1	22	09	01	Pembinaan Administrasi PNPM-MP kab. Merangin 2014	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan	Kab.Merangin	Kec	12		366.244,00							
1	22	15		PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN						449.821,00							
1	22	15	04	Pendayagunaan Profil Desa dan aplikasi profil desa	Meningkatkan keakuratan data profil desa/kelurahan	Kab. Merangin	Kec	24		148.608,00							
1	22	15	05	Pelatihan Kader Posyandu	Meningkatnya SDM Kader Posyandu	Kab. Merangin	Orang	60		55.611,00							
1	22	15	06	Penyelenggaraan Lomba Desa dan kelurahan Unggulan	Terwujudnya Desa Binaan	Kab. Merangin	Kec	24		159.812,00							
1	22	15	07	Pemberdayaan Sistem Informasi Posyandu (SIP)	Meningkatkan Pendataan Posyandu	Kab. Merangin	Orang	132		43.050,00							
1	22	15	08	Program peningkatan Perluasan perlindungan Sosial	Meningkatnya keakuratan data pemberian KPS dan BLSM	Kab. Merangin	Kec	24		25.450,00							
1	22	15	09	Pembinaan Hutan Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat desa akan pentingnya Kelestarian hutan di desa	Kab. Merangin	Tahun	1		5.000,00							
1	22	15	10	Pembinaan Desa Mandiri Energi Berbasis Terbarukan Biogas	Terciptanya desa mandiri energi berbasis terbarukan Biogas	Kab. Merangin	Tahun	1		12.290,00							
1	22	16		PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN						194.511,00							
1	22	16	09	Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro kecil dan Menengah di perdesaan (Pembinaan Transpormasi UED-SP ke BUMDES)	Terbinanya Pengurus UED-SP Ke BUMDES desa/kelurahan	Kab. Merangin	Kec	24		48.470,00							
1	22	16	10	Pembinaan dan Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional	Meningkatnya pembinaan TTTG Kab.Merangin	Kab. Merangin	Kec	24		93.417,00							
1	22	16	11	Pemberdayaan Pelaku PNPM-PISEW Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Meningkatnya kegiatan Pembinaan Pemberdayaan pelaku PISEW di kecamatan dan kabupaten	Kab. Merangin	Kec	12		52.624,00							
1	22	17		PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA						98.930,00							
1	22	17	02	Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Meningkatnya kecamatan yang dibina	Kab. Merangin	Tahun	24		98.930,00							

1	22	18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA							475.375,00						
1	22	18	08 Fasilitasi Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pembinaan Adminstrasi Desa	Meningkatnya Jumlah Desa yang difasilitasi dan dibina	Kab. Merangin	Kec	24			143.457,00						
1	22	18	13 Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Kekayaan Desa	Terwujudnya Pembinaan dan monitoring pengelolaan kekayaan desa	Kab. Merangin	Kec	24			87.980,00						
1	22	18	17 Raker Kepala Desa se-Kabupaten Merangin	Meningkatnya Kinerja Kepala Desa	Kab. Merangin	Desa	205			48.378,00						
1	22	18	19 Fasilitasi Pembinaan Administrasi Desa	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Kab. Merangin	Desa	205			52.250,00						
1	22	18	21 Pelatihan Sekdes dalam penyusunan RPJMDesa	Meningkatnya Kualitas SDM Sekretaris Desa	Kab. Merangin	Desa	205			143.310,00						
1	22	19	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN							1.186.996,00						
1	22	19	03 Pencanaan P2WKSS	Meningkatnya kualitas SDM Pengurus P2WKSS	Kab. Merangin	Kec	24			180.484,00						
1	22	19	10 Sistim Informasi Manajemen PKK	Meningkatnya SDM Pengurus dan Kader PKK	Kab. Merangin	Kec	24			130.222,00						
1	22	19	11 Jambore Temu Kader PKK Tingkat Kabupaten	Meningkatnya kualitas SDM Kader PKK	Kab. Merangin	Kec	24			265.538,00						
1	22	19	12 jambore Temu Kader PKK Tingkat Provinsi	Meningkatnya kualitas kader PKK	Kab. Merangin	Kec	24			167.327,00						
1	22	19	13 Jambore Temu Kader PKK Tingkat Nasional	Meningkatnya kualitas kader PKK	Kab. Merangin	Kec	24			124.850,00						
1	22	19	15 Pembinaan PKK Kabupaten Merangin	Meningkatnya kualitas SDM Kader PKK	Kab. Merangin	Kali	24			189.673,00						
1	22	19	14 Lomba Masak Serba IKAN Tingkat Provinsi	Terpenuhinya Makan yang sehat bergizi	Provinsi	KALI	1			37.800,00						
1	22	19	16 Lomba Masak Serba IKAN Tingkat Kabupaten	Terpenuhinya Makan yang sehat bergizi	Kab. Merangin	KALI	1			22.024,00						
1	22	20	18 LOMBA Posyandu	Meningkatnya kualitas kader Pos yandu	Kab. Merangin	KALI	1			16.084,00						
1	22	20	19 Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	Meningkatnya pengetahuan tentang UP2K	Kab. Merangin	KALI	1			20.970,00						
1	22	20	20 Lomba Pemanfaat Pekarangan	Meningkatnya SDM Pengurus dan Kader PKK	Kab. Merangin	KALI	1			16.044,00						
1	22	20	21 Lomba Prilaku Hidup Bersih dan Sehat	Meningkatnya SDM Pengurus dan Kader PKK	Kab. Merangin	KALI	1			15.980,00						
TOTAL KEBUTUHAN DANA (= A+ B)										4.528.362,00						

BANGKO, Januari 2014
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA KAB MERANGIN

Drs. H. MARZUKI YAHYA
Pembina Utama Muda
NIP. 19570510 198203 1 010



BADA

N0	PROGRAM UTAMA
1	2
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyediaan Jasa Surat Menyurat)
2	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)
3	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan)
4	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan)
5	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor)
6	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyediaan Alat Tulis Kantor)
7	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan)
8	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor)
9	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan)
10	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyediaan Makan dan Minumt)
11	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah)
12	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran)

(Penyediaan Dana Perjalanan Dinas Dalam Daerah)

14 **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**

(Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor)

15 **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**

(Pengadaan Peralatan Gedung Kantor)

16 **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**

(Pengadaan Komputer)

17 **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**

(Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor)

18 **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**

(Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional)

19 **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**

(Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor)

20 **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**

(Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya)

21 **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**

(Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu)

22 **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**

(Pendidikan dan Pelatihan Formal)

23 **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** (Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD)

24 **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA**

	Keuangan SKPD)
25	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (Penyusunan RKA-DPA dan DPA-P)
26	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (Penyusunan Laporan Tahunan SKPD)
27	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN (Penyelenggaraan Pameran Pembangunan)
28	PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI PNPM-MP KABUPATEN MERANGIN 2014) (Pembinaan Administrasi PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Merangin 2014)
29	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN (Pendayagunaan Profil Desa dan Pelatihan Aplikasi Profil Desa)
30	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN (Pelatihan Kader Pos Yandu)

31	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN (Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan Unggulan)
32	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN (Pemberdayaan Sistem Informasi Posyandu (SIP))
33	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN (Program Peningkatan Perluasan Perlindungan Sosial)
34	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI

(Pembinaan Hutan Desa Berbasis pemberdayaan Masyarakat Pedesaan)

35 **PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN**

(Pembinaan Desa Mandiri Energi Berbasis Terbarukan Biogas)

36 **PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN**

(Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan (Sosialisasi dan Bimbingan Teknis BUMDes)

37 **PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN**

(Pembinaan dan Pelaksanaan Gelar TTG TK. Nasional)

38 **PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN**

(Pemberdayaan Pelaku PISEW Tingkat Kecamatan dan Kabupaten)

39 **PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA**

(Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

40 **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA**

(Fasilitasi Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa)

41 **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA**

(Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan

42 **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA**

(Raker Kepala Desa dan Ketua BPD se-Kabupaten)

43 **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA**

- 44 **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAHAN DESA**
(Fasilitasi Pembinaan Adminstrasi Desa)
- 45 **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAHAN DESA**
(Pelatihan Sekretaris Desa dalam Penyusunan
RPJMD Desa)
- 46 **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN
DI PERDESAAN**
(Pencanangan, Pembinaan dan Penilaian P2W-KSS)
- 47 **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN
DI PERDESAAN**
(Sistem Informasi Manajemen PKK)
- 48 **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN
DI PERDESAAN**
(Jambore Temu Kader PKK TK. Kabupaten)
- 49 **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN
DI PERDESAAN**
(Jambore Temu Kader PKK TK. Provinsi)
- 50 **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN
DI PERDESAAN**
(Jambore Temu Kader TK. Nasional)
- 51 **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN
DI PERDESAAN**
(Lomba masak serba ikan dan Lomba Beragam,
bergizi, seimbang dan aman (B2SA) tingkat Provinsi)
- 52 **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN
DI PERDESAAN**
(Pembinaan 10 Program Pokok PKK)
- 53 **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN
DI PERDESAAN**
(Lomba masak serba ikan dan Lomba Beragam,
bergizi, seimbang dan aman (B2SA) tingkat Kabupaten)
- 54 **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN
DI PERDESAAN**
(Lomba POSYANDU)
- 55 **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN**

56	<p>(Lomba Tertib Admistrasi PKK)</p> <p>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN</p> <p>(Lomba usaha peningkatan pendapatan keluarga)</p>
----	--

57	<p>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN</p> <p>(Lomba pemamfaatan pekarangan)</p>
58	<p>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN</p> <p>(LombaPrilaku Hidup Bersih dan Sehat)</p>
	<p>JUMLAH</p>

LAMPIARAN
PENETAPAN KINERJA
N PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN

SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	
	URAIAN	TARGET
3	4	5
Terpenuhinya kebutuhan akan jasa surat menyurat kantor pemerintah daerah	Surat menyurat yang dihasilkan	100% 220 Surat
Tersedianya jaringan komunikasi telepon kantor, air bersih dan listrik di lingkungan kantor pemerintah daerah	Jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia di kantor pemerintah daerah	1 Paket 1 Tahun
Meningkatnya jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh pemeliharaan dan perizinan	100% 5 unit
Meningkatnya keakuratan data keuangan SKPD	Teradministrasinya keuangan SKPD	100% 10 Orang
Meningkatnya kebersihan dan kerapian lingkungan kantor	Terjaganya kebersihan lingkungan kantor Kebersihan Kantor	100% 1 Paket
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor bagi aparatur pemerintah	Tersedianya alat tulis kantor bagi aparatur pemerintah	1 Paket 1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan akan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100% 1 Paket
Meningkatnya fasilitas bangunan kantor yang mendapat instalasi listrik/ penerangan	Tersedianya instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100% 1 Paket
Meningkatnya pemgetahuan umum dan peraturan perundang-undangan bagi aparatur	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan bagi aparatur	100% 1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman bagi aparatur	Tersedianya makanan dan minuman bagi aparatur Makan dan Minum	90% 1 Tahun
Terkoordinasinya urusan-urusan pemerintah daerah	Rapar-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	100% 1 Tahun
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang teradministrasi	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	100% 14 Orang

lembaga dan organisasi masyarakat	daerah	1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	100% 1 Paket
Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	100% 1 Paket
Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja	Terlaksananya kegiatan pengadaan komputer	100% 1 Paket

Meningkatnya ketahanan dan keindahan bangunan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	80% 1 Unit
Meningkatnya umur ekonomis kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	70% 7 Unit
Meningkatnya ketahanan peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/ berkala	60% 1 Paket
Meningkatnya kerapian dan wibawa aparatur	Tersedianya Pakaian Dinas sipil harian	100% 45 Orang
Mingkatnya etos kerja dan kerapian dalam berpakaian	Tersedianya pakaian batik dan pakaian olah raga bagi aparatur	100% 240 Orang
Meningkatnya SDM aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	100% 12 Orang
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Lakip SKPD Kinerja SKPD	100% 15 Buku
Tersedianya Laporan Keuangan semesteran dan keuangan akhir tahun	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	100% 34 Buku

Tersedianya RKA-DPA dan DPA-P SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA-DPA dan DPA-P	100% 34 Buku
Tersedianya Laporan Tahunan SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	100% 15 Buku
Meningkatnya informasi tentang pembangunan yang dapat diketahui oleh masyarakat	Terlaksananya Pameran Pembangunan	100% 1 Keg
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan	Terbinanya masyarakat pedesaan di kabupaten merangin	70% 12 Kec
Meningkatnya keakuratan data profil desa/ kelurahan	Tersusunnya data profil desa/ kelurahan secara apli	80% 205 Desa 10 Kelurahan
Meningkatnya SDM kader posyandu	Terlaksananya pelatihan posyandu	90% 35 Orang

Terwujudnya desa binaan dan unggulan	Jumlah desa binaan	100% 24 Kec
Meningkatnya SDM kader posyandu	Terselenggaranya pembinaan SIP	75% 25 Orang
Meningkatnya keakuratan data pemberian KPS dan BLSM	Terlaksananya pemantauan pengaduan masyarakat KPS dan BLSM	75% 24 Kecamatan
Meningkatnya kesadaran masyarakat desa	Terlaksananya pembinaan hutan desa berbasis nem	75%

Terciptanya desa mandiri energi berbasis terbarukan energi terbarukan biogas	Terlaksananya pembinaan desa mandiri berbasis energi terbarukan biogas	75% 1 Kegiatan
Meningkatnya kualitas pengurus BUMDes	Terlaksananya pembinaan pengurus BUMDes	90% 32 Orang
Meningkatnya pembinaan TTG Kab. Merangin	Terlaksananya pembinaan dan gelar TTG Tk. Nas	90% 1 kali
Meningkatnya pembinaan pemberdayaan pelaku PISEW di Kec dan Kab	Terlaksananya Pembinaan Pelaku PNPM PISEW di Kecamatan dan Kabupaten	100% 2 Kecamatan
Meningkatnya partisipasi dan peran masyarakat desa/kelurahan yang dilandasi dengan semangat gotong royong	Pembinaan, penancangan dan penilaian BBGRM	100% 1 Keg
Meningkatnya jumlah desa yang difasilitasi dan dibina	Jumlah desa yang difasilitasi dan dibina	100% 24 Kec
Terwujudnya Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Kekayaan Desa	Terlaksananya pembinaan dan monitoring pengelolaan Kekayaan Desa	100% 205 Desa
Meningkatnya kinerja kepala desa dan ketua BPD	Tersedianya Kepala Desa dan Ketua BPD yang memahami tugas dan tanggung jawabnya	100% 205 Desa

Meningkatnya keakuratan data aset BPMPD	Terwujudnya penatausahaan aset yang baik	100% 1 Keg
---	--	---------------

Meningkatnya tertib administrasi desa	Terlaksananya Fasilitasi pembinaan Adminstrasi D	100% 205 Desa
Meningkatnya Kualitas SDM Sekdes	Terlaksananya pelatihan RPJMD Desa	100% 115 Orang
Meningkatnya kualitas SDM pengurus P2WKSS	Terwujudnya peningkatan kualitas pengurus P2WK	100% 1 Keg
Meningkatnya kualitas SDM pengurus dan kader TP-PKK	Terwujudnya peningkatan kualitas pengurus dan Kader TP-PKK	100% 40 Orang
Meningkatnya kualitas SDM kader TP-PKK	Terwujudnya peningkatan SDM kader TP-PKK	100% 24 Kec
Meningkatnya kualitas SDM kader PKK	Terwujudnya peningkatan SDM kader PKK	100% 90 Orang
Meningkatnya kualitas SDM kader TP-PKK	Terwujudnya peningkatan SDM kader TP-PKK	100% 20 Orang
Meningkatnya pengetahuan TP-PKK tentang masaka yang sehat	Terpenuhinya makan yang sehat dan bergizi	100% 12 Orang
Meningkatnya kualitas SDM kader dan pengurus PKK Kab. Merangin	Terwujudnya peningkatan kualitas kader dan pengurus PKK	100% 120 Orang
Meningkatnya pengetahuan TP-PKK tentang masaka yang sehat	Terpenuhinya makan yang sehat dan bergizi	100% 100 Orang
Meningkatnya kualitas kader posyandu	Terlaksananya lomba posyandu	100% 1 Kegiatan
Meningkatnya kualitas kader posvandu	Terlaksananya lomba tertib administrasi PKK	100%

Meningkatnya kualitas pengetahuan tentang UP2K	Terlaksananya lomba UP2K	100% 1 Kegiatan
--	--------------------------	--------------------

Meningkatnya pengetahuan kader dan pengurus TP-PKK tentang mamfaat pekarangan	Terlaksananya lomba pemamfaatan pekarangan	100% 1 Kegiatan
Meningkatnya pengetahuan kader dan pengurus TP-PKK tentang pentingnya hidup bersih dan sehat	Terlaksananya lomba prilaku hidup bersih dan sehat	100% 1 Kegiatan

2014

INDIKATOR KINERJA OUTCOME		
URAIAN	TARGET	ANGGARAN
6	7	8
Adanya dana jasa surat menyurat	100% 220 Surat	960.000
Adanya dana penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Paket 1 Tahun	38.400.000
adanya dana jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	100% 5 Unit	9.210.000
Adanya dana jasa administrasi keuangan	100% 11 Orang	64.200.000
Tersedianya dana jasa kebersihan kantor	100% 1 Paket	11.830.000
Adanya dana alat tulis kantor	1 Paket 1 Tahun	75.692.300
Adanya dana barang cetakan dan penggandaan	100% 1 Paket	54.665.000
Adanya dana penyediaan instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100% 1 Paket	8.940.000
Adanya dana penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	100% 1 Tahun	38.000.000
Adanya dana makanan dan minuman	90% 1 Tahun	121.910.000
Adanya dana kegiatan konsultasi dan oordinasi ke luar daerah	100% 1 Tahun	412.200.000
Adanya jasa administrasi perkantoran yang Baik	100% 14 Orang	113.200.000

perjalanan dinas dalam daerah	1 Tahun	
Adanya dana pengadaan perlengkapan gedung kantor	100% 1 Paket	61.450.000
Adanya dana pengadaan peralatan gedung kantor	100% 1 Paket	39.150.000
Adanya dana pengadaan komputer	100% 1 Paket	34.250.000

Tersedianya dana pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	80% 1 Unit	6.390.000
Adanya dana pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	70% 7 Unit	102.000.000
Adanya dana pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	60% 1 Paket	27.000.000
Jumlah dana yang dibutuhkan Aparatur	100% 45 Orang	22.500.000
Adanya dana pengadaan pakaian batik dan pakaian olah raga	100% 240 Orang	72.000.000
Adanya dana pendidikan dan pelatihan formal	100% 12 Orang%	50.000.000
Adanya dana penyusunan LAKIP SKPD	100% 15 Buku	5.838.000
Adanya dana penyusunan laporan keuangan SKPD	100% 34 Buku	10.726.000

Adanya dana Penyusunan RKA-DPA dan DPA-P	100% 34 Buku	12.020.500
Adanya dana penyusunan laporan tahunan SKPD	100% 15 Buku	5.268.000
Adanya dana pameran pembangunan Program Kegiatan	100% 1 Keg	42.367.500
Adanya dana kegiatan PNPM MP kabupaten merangin	70% 12 Kec	366.244.000
Tersedianya dana yang dibutuhkan	80% 205 Desa 10 Kelurahan	148.608.000
Tersedianya dana yang dibutuhkan	90% 35 Orang	47.636.000

Jumlah dana yang dibutuhkan	100% 24 Kec	145.412.500
Jumlah dana yang dibutuhkan	75% 25 Orang	43.050.000
Jumlah dana yang dibutuhkan	75% 24 Kecamatan	25.450.000
Jumlah dana yang dibutuhkan	75%	5.000.000

Jumlah dana yang dibutuhkan	75% 1 Kegiatan	12.290.000
Jumlah dana yang dibutuhkan	90% 32 Orang	48.470.000
Jumlah dana yang dibutuhkan	90% 1 kali	93.417.500
Jumlah dana yang dibutuhkan	100%	52.624.000
1	12 Kecamatan	
Jumlah dana yang dibutuhkan	100% 1 Keg	98.930.000
Tersedianya dana yang dibutuhkan	100% 24 Kec	143.457.000
Jumlah dana yang dibutuhkan	100% 205 Desa	87.980.000
Jumlah dana yang dibutuhkan	100% 205 Desa	48.378.000

Jumlah dana yang dibutuhkan	100% 1 keg	19.340.000
-----------------------------	---------------	------------

Jumlah dana yang dibutuhkan	100% 205 Desa	52.250.000
Jumlah dana yang dibutuhkan	100% 115 Orang	143.310.500
Tersedianya dana yang dibutuhkan	100% 1 Keg	180.485.000
Tersedianya dana yang dibutuhkan	100% 40 Orang	130.222.600
Tersedianya dana yang dibutuhkan	100% 24 Kec	265.538.600
Tersedianya dana yang dibutuhkan	100% 90 Orang	167.327.500
Tersedianya dana yang dibutuhkan	100% 20 Orang	124.850.000
Tersedianya dana yang dibutuhkan	100% 12 Orang	37.800.000
Tersedianya dana yang dibutuhkan	100% 120 Orang	189.673.600
Tersedianya dana yang dibutuhkan	100% 100 Orang	22.024.000
Tersedianya dana yang dibutuhkan	100% 1 Kegiatan	16.084.000
Tersedianya dana yang dibutuhkan	100%	16.044.000

Tersedianya dana yang dibutuhkan	100% 1 Kegiatan	20.970.000
----------------------------------	--------------------	------------

Tersedianya dana yang dibutuhkan	100% 1 Kegiatan	16.044.000
Tersedianya dana yang dibutuhkan	100% 1 Kegiatan	15.980.000
		4.245.058.100

BANGKO, Januari 2014
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MERANGIN

Drs. H. MARZUKI YAHYA
Pembina Utama Muda
NIP. 19570510 198203 1 010